

Dampak desentralisasi fiskal dan kemandirian pemerintah daerah terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia: Sebuah Literature Review

Muhammad Guntur¹

Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Semarang
Sekaran, Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah
e-mail: muhammadguntur@students.unnes.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis peran desentralisasi fiskal dan kemandirian pemerintah daerah dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia. Data menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal, setelah lebih dari dua dasawarsa penerapannya, memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Penelitian ini juga mengungkap ketimpangan antar wilayah, dengan Kawasan Indonesia timur masih tertinggal dalam mengatasi kemiskinan dibandingkan dengan wilayah barat. Kemandirian keuangan daerah diidentifikasi sebagai faktor krusial yang menentukan tingkat ketergantungan suatu daerah pada bantuan eksternal. Kenaikan kemandirian diartikan sebagai langkah menuju penurunan ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat, namun, pengecualian ditemukan dalam konteks tingkat ketergantungan yang tinggi, yang dapat mempengaruhi dampaknya terhadap tingkat kemiskinan. Analisis regional menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam tingkat kemandirian di Kawasan Indonesia barat, sementara Kawasan Indonesia timur memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengatasi tingkat kemiskinan. Faktor perbedaan sumber daya dan pembangunan regional yang tidak merata memainkan peran kunci dalam ketidaksetaraan ini.

Kata kunci : *Desentralisasi Fiskal, Kemandirian Keuangan Daerah, Kemiskinan, Otonomi Daerah*

ABSTRACT

This research analyzes the role of fiscal decentralization and regional government independence in reducing poverty levels in Indonesia. Data shows that after more than two decades of implementation, fiscal decentralization has significantly and negatively impacted poverty. This research also reveals disparities between regions, with eastern Indonesia still lagging in overcoming poverty compared to the western region. Regional financial independence is identified as a crucial factor that determines the level of dependence of a region on external assistance. Increased independence is a step towards reducing dependence on central government assistance. However, exceptions are found in the context of high levels of dependence, which may influence the impact on poverty levels. Regional analysis shows significant progress in the level of independence in western Indonesia, while eastern Indonesia needs a long time to overcome poverty levels. Resource differences and uneven regional development play a vital role in this inequality..

Keywords : *Fiscal Decentralization, Regional Financial Independence, Poverty, Regional Autonomy*

PENDAHULUAN

Kebijakan desentralisasi mulai disahkan sejak era reformasi dengan terbitnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Instrumen tersebut merupakan suatu transformasi baru dalam pemerintahan dengan membagi dan mendelegasikan tugas dan wewenang dari yang semula dilaksanakan secara terpusat oleh pemerintah pusat beralih kepada pemberdayaan pemerintah daerah untuk mengelola daerah otonomnya secara mandiri (Maria et al., 2019). Dalam proses penerapannya UU No. 22 Tahun 1999 terjadi beberapa perubahan mulai dari UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2008, dan terakhir UU No. 23 Tahun 2014. Perubahan tersebut merupakan suatu bentuk penyempurnaan terhadap pelaksanaan desentralisasi di Indonesia. Pemberian wewenang kepada pemerintah daerah Dengan tujuan agar mampu secara mandiri mengelola pemerintahan sesuai dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan, bertujuan untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan layanan, pemberdayaan, dan partisipasi aktif masyarakat (Ciptawaty, 2019). Pemerintah daerah memiliki kemampuan yang besar untuk meningkatkan penerimaan daerah melalui berbagai sektor perekonomian (Maznawaty et al., 2015). Proses untuk meningkatkan penerimaan daerah memerlukan sebuah perencanaan yang tersusun secara sistematis dan terstruktur. Dalam hal ini pemerintah daerah diberikan wewenang untuk melakukan perencanaan secara *bottom up* yang melibatkan masyarakat agar menciptakan suatu perencanaan yang inklusif.

Kemunculan kebijakan otonomi daerah tersebut diikuti dengan adanya kebijakan desentralisasi fiskal dengan tujuan agar tercipta suatu keseimbangan kapasitas fiskal antara pusat-daerah dan antar-fiskal daerah (Saragih, 2014). Penerapan desentralisasi fiskal diharapkan agar pemerintah daerah mampu membangun pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah daerah

Ditekankan untuk meningkatkan efektivitas pengeluaran pemerintah daerah guna mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur umum. Selain itu, dengan alokasi yang bijaksana pada pengeluaran pemerintah daerah, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah (Kusuma, 2016). Suatu daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang baik akan lebih mampu untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mampu menghadirkan lapangan pekerjaan yang lebih luas sehingga tingkat pengangguran dapat berkurang.

Pelaksanaan desentralisasi sudah berjalan lebih dari 20 tahun namun sampai saat ini belum mampu untuk menciptakan kesejahteraan secara merata pada setiap daerah di Indonesia. Pembangunan nasional terlalu memfokuskan tujuannya pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, sehingga mengabaikan terjadinya disparitas pembangunan yang cukup besar di beberapa wilayah di Indonesia. Investasi dan sumber daya saat ini cenderung terfokus di wilayah perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan, sementara daerah pinggiran mengalami penyusutan sumber daya yang berlebihan. Hal ini mengakibatkan ketidakseimbangan pembangunan yang pada akhirnya menjadi permasalahan dalam skala makro, merugikan tujuan pembangunan nasional yang diinginkan. (Putri et al., 2016). Ketimpangan pembangunan di Indonesia secara makro dipengaruhi oleh disparitas dalam alokasi sumber daya, manusia, infrastruktur, teknologi, dan modal (Kamaruddin & Alam, 2019).

Tabel 1. 10 Daerah Tingkat Kemiskinan Tertinggi di Indonesia Tahun 2022

Provinsi	2022
Papua	26.68
Papua Barat	21.38
Nusa Tenggara Timur	20.14
Maluku	16.1
Gorontalo	15.465
Aceh	14.695
Bengkulu	14.48
Nusa Tenggara Barat	13.75
Sulawesi Tengah	12.315
Sumatera Selatan	11.925

Sumber: BPS, 2022

Berdasarkan data diatas menjelaskan bahwa 7 dari 10 Provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi berasal dari Kawasan Timur Indonesia diantaranya Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, Gorontalo, NTB, dan Sulawesi Tengah. Artinya, menunjukkan bahwa terjadi ketimpangan yang cukup besar antara Indonesia bagian timur dan barat. Ketimpangan pembangunan dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu : (1) Kurangnya aksesibilitas (Raafi'i et al., 2018), (2) Rendahnya kualitas sumber daya manusia, (3) Jumlah penduduk (Didia, 2016), (4) Perkembangan pusat pertumbuhan wilayah, (5) Kawasan strategis daerah belum berkembang (Bappenas, 2020). Realita yang terjadi menunjukkan bahwa praktik otonomi daerah belum mampu untuk menciptakan pemerataan. Barangkali memang yang terjadi pada Indonesia adalah dampak negative kebijakan desentralisasi yang membuat pemerintah daerah tidak mampu untuk membangun perekonomian dan kesejahteraan untuk daerahnya. Beberapa dampak negative desentralisasi yaitu sulit mencapai skala ekonomi, pembengkakan birokrasi, korupsi, dan terjadinya fragmentasi pasar (Galela, 2016). Tujuan desentralisasi untuk menciptakan kemandirian kepada setiap daerah untuk membangun perekonomiannya sepertinya belum tercapai jika ketimpangan masih terdapat di penjuru wilayah Indonesia.

Penelitian ini berusaha untuk mengkaji lebih mendalam mengenai pengaruh desentralisasi fiskal dan kemandirian pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga dapat menjadi referensi dalam penelitian mengenai permasalahan otonomi daerah. Semua temuan dalam penelitian ini akan membahas secara mendalam bagaimana proses desentralisasi fiskal dan kemandirian keuangan daerah yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan permasalahan diatas, maka penelitian ini memiliki peran penting untuk mengungkap penerapan kebijakan desentralisasi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi literatur yang membuat peneliti dapat menyusun inti sari berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang sesuai dengan topik Dampak desentralisasi fiskal dan kemandirian pemerintah daerah terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia (Morgan, 2022). Fokus penelitian ini adalah temuan yang membahas keterkaitan antara desentralisasi fiskal dan kemandirian pemerintah terhadap kemiskinan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Desentralisasi Fiskal Dalam Menurunkan Tingkat Kemiskinan

Penelitian yang dilakukan terhadap penerapan desentralisasi fiskal di Indonesia perlu menjadi perhatian penting. Sudah lebih dari dua dasawarsa kebijakan tersebut diterapkan sehingga perlu ditinjau kembali dampak yang ditimbulkan karena sejauh ini masih terdapat beberapa ketimpangan yang terjadi antara wilayah barat dan timur Indonesia. Berdasarkan Syamsul (2020) melakukan penelitian mengenai dampak desentralisasi fiskal yang diukur melalui perbandingan rasio transfer dari pemerintah pusat, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan belanja modal terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.. Penelitian tersebut menemukan desentralisasi fiskal yang diukur melalui perbandingan rasio transfer dari pemerintah pusat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terbukti memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Ini berarti bahwa desentralisasi fiskal dapat menyebabkan penurunan kemiskinan di Indonesia, menunjukkan pentingnya kelanjutan penerapan kebijakan tersebut. Kemudian, Woyanti (2013) meneliti terkait pengaruh UMP, pertumbuhan ekonomi, dan desentralisasi fiskal terhadap kemiskinan pra dan pasca desentralisasi fiskal di Jawa Tengah. Hasilnya menunjukkan bahwa pasca penerapan desentralisasi fiskal tingkat kemiskinan menurun.

Kemudian, perdebatan yang sering muncul yaitu terdapatnya ketimpangan meskipun disisi lain desentralisasi fiskal. Jika kita lihat perkembangan perekonomian dan tingkat kemiskinan di Kawasan Indonesia timur tentu masih tertinggal jauh apabila dibandingkan dengan Kawasan Indonesia barat. Kemudian, Syamsul (2020) menjelaskan bahwa Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap tingkat kemiskinan sangat bergantung pada rasio desentralisasi fiskal yang diterapkan. Penelitian ini juga berhasil menunjukkan bahwa efek dari pengeluaran dan pendapatan terhadap penurunan tingkat kemiskinan memerlukan periode waktu tertentu. Maka dari itu, ketimpangan yang terjadi dapat disebabkan karena Kawasan Indonesia timur masih memerlukan jeda waktu yang cukup lama untuk dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Sejak sebelum penerapan desentralisasi, Kawasan Indonesia barat sudah mengalami Pembangunan sehingga berpengaruh juga terhadap tingkat desentralisasi fiskal.

Tingkat desentralisasi fiskal mencerminkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah. Saat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah (TPD) meningkat, kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisasi juga akan meningkat ukuran desentralisasi fiskal dapat dikategorikan baik apabila $> 40\%$ (Mahmudi, 2019). Daerah dengan rasio desentralisasi fiskal yang baik diharapkan akan mampu untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan hal tersebut sedang terjadi di Kawasan Indonesia barat. Namun, masih belum tercipta di Kawasan Indonesia timur. Perbedaan sumber daya yang dimiliki oleh setiap daerah juga menjadi indikator terjadinya ketimpangan karena apabila kita amati Kawasan Indonesia bagian barat memiliki sumber daya yang dilengkapi dengan berbagai kelengkapan untuk mengolahnya, berbeda halnya yang terjadi dengan Indonesia Kawasan timur.

Pengaruh kemandirian pemerintah daerah terhadap penurunan tingkat kemiskinan

Kemandirian keuangan daerah dapat menjelaskan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan yang diberikan oleh pihak luar seperti pemerintah pusat. Ketika tingkat kemandirian keuangan daerah meningkat berarti ketergantungan pemerintah daerah pada bantuan dari pihak eksternal semakin rendah, dan sebaliknya. Tingkat kemandirian keuangan daerah juga mencerminkan seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah. Selain itu, semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah, semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah, yang merupakan elemen utama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Fathah, 2017). Kemandirian keuangan memberikan fleksibilitas dalam merancang dan melaksanakan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal. Pemerintah daerah dapat lebih responsif terhadap tantangan kemiskinan yang khusus bagi daerah mereka.

Dengan sumber daya keuangan yang cukup, pemerintah daerah dapat menginvestasikan lebih banyak dana dalam pengembangan infrastruktur dan pelayanan publik. Infrastruktur yang berkualitas dan pelayanan publik yang

efisien dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan. Berdasarkan penelitian Febiandani & Aji Suseno (2018) menemukan bahwa terdapat hubungan negative dan signifikan antara kemandirian keuangan daerah terhadap tingkat kemiskinan. Pada beberapa kasus terdapat bahwa kemandirian keuangan tidak berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Salah satunya seperti yang diteliti oleh Purnomo & Danuta (2022) menemukan bahwa kemandirian keuangan tidak berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Hasil tersebut disebabkan karena tingkat ketergantungan yang masih tinggi terhadap bantuan dari pemerintah pusat

SIMPULAN

Desentralisasi fiskal memiliki peran penting dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia. Studi menunjukkan dampak negatif dan signifikan desentralisasi fiskal terhadap kemiskinan, memperkuat urgensi kebijakan ini. Meskipun demikian, masih terdapat ketimpangan antara wilayah barat dan timur Indonesia dalam menghadapi dampak desentralisasi fiskal. Kemandirian keuangan daerah menjadi faktor kunci dalam menentukan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan eksternal. Tingkat kemandirian mencerminkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah dan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meskipun kemandirian keuangan dihubungkan dengan penurunan tingkat kemiskinan, ada pengecualian dimana tingkat ketergantungan yang tinggi pada bantuan pemerintah pusat dapat mempengaruhi hasil tersebut.

SARAN

1. Peningkatan kemandirian pemerintah daerah diiringi dengan perlunya dukungan kebijakan yang lebih holistik.
2. Perlu dilakukan penyesuaian dan evaluasi kebijakan desentralisasi fiskal untuk meminimalkan ketimpangan antar wilayah.
3. Adanya perbedaan dalam dampak kemandirian keuangan pada tingkat kemiskinan menunjukkan perlunya pendekatan yang kontekstual dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan regional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ciptawaty, U. (2019). Pola Pertumbuhan Ekonomi Daerah Otonomi Baru (DOB) Berdasarkan Tipologi Klassen di Provinsi Lampung (Lampung Timur, Way Kanan Dan Kota Metro). *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(2), 229–241.
- Fathah, R. N. (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal EBBANK: Jurnal Ilmiah Bidang Ekonomi Bisnis Dan Perbankan*, 8(1), 33–48. <http://www.ebbank.stiebbank.ac.id/index.php/EBBANK/article/download/109/97>
- Febiandani, R., & Aji Suseno, D. (2018). Analisis Hubungan Kemandirian Keuangan Daerah dan Ketergantungan Daerah Terhadap Pengangguran dan Kemiskinan. *Economics Development Analysis Journal*, 5(2), 217–225. <https://doi.org/10.15294/edaj.v5i2.22035>
- Galela, M. R. (2016). Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi Perlukah Desentralisasi Fiskal Diperluas? *Info Artha*, 59–68. <http://www.jurnal.stan.ac.id/index.php/JIA/article/view/41>
- Kamaruddin, C. A., & Alam, S. (2019). Analisis Potensi Sektor Unggulan dan Pemetaan Kemiskinan Masyarakat di Wilayah Maminasata Sulawesi Selatan. *Jurnal Ad'ministrare*, 5(2), 85. <https://doi.org/10.26858/ja.v5i2.7886>
- Kusuma, H. (2016). Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 9(1), 1–11. <http://eprints.umm.ac.id/57958/7/Kusuma - Fiscal Decentralization Fund Transfers Economic Growth Panel Data.pdf>
- Maria, E., Halim, A., Suwardi, E., & Miharjo, S. (2019). Desentralisasi fiskal dan probabilitas terjadinya korupsi: Sebuah bukti empiris dari Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 22(1), 1–22. <https://doi.org/10.24914/jeb.v22i1.2036>
- Maznawaty, E. S., Ilat, V., & Elim, I. (2015). Analisis Penerimaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Utara. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(3), 906–916.
- Morgan, H. (2022). Conducting a Qualitative Document Analysis. Qualitative Report. *Qualitative Report*, 27(1), 64–77. <https://doi.org/https://doi.org/10.46743/2160-3715/2022.5044>
- Purnomo, S. D., & Danuta, K. S. (2022). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah terhadap Kemiskinan: Studi Empiris di Sumatera Utara. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(1), 215.

<https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i1.513>

Syamsul. (2020). Desentralisasi Fiskal Dan Tingkat Kemiskinan Di Indonesia. *Akuntabel*, 17(1), 140–147.

<https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/AKUNTABEL/article/view/7335>

Woyanti, N. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan UMP Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Pra dan Pasca Desentralisasi Fiskal. *Media Ekonomi Dan Manajemen*, 28(2), 28–43.